

B. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik  
Akuntansi merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik, tetapi keduanya memiliki perbedaan karena lingkungan yang mempengaruhinya berbeda.

Organisasi sektor publik berada dalam lingkungan yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- Faktor ekonomi

- ↳ Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita (GDP/SDP), struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan & kesenjangan ekonomi, sektor informal.

### • Faktor Politik

↳ Hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yg berkuasa, ideologi negara, elit politik & massa, jaringan internasional, kelembagaan.

### • Faktor Kultural

↳ Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, Historis, Sosiologi Masyarakat, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan.

### • Faktor demografi

↳ Pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan.

## C. Value for Money

Value for Money adalah konsep pengelolaan Sektor Publik agar penggunaan dana Publik memberikan manfaat yang maksimal dan tidak terjadi pemborosan. Konsep ini menekankan pengelolaan yang baik berdasarkan tiga unsur utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

### 1. Ekonomi

" Menggunakan sumber daya (input) dengan kualitas dan jumlah tertentu pada biaya serendah mungkin, sehingga tidak terjadi pengeluaran yang boros atau tidak produktif.

## 2. Efisiensi

- ↳ Mencapai output yang maksimal dengan input tertentu, atau menggunakan input paling sedikit untuk menghasilkan output yang diinginkan.

## 3. Efektivitas

- ↳ Mengukur tingkat keberhasilan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai (outcome) dengan output.

Selain tiga unsur tersebut, beberapa pihak menambahkan dua unsur lain, yaitu :

- Keadilan (equity)

- ↳ memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

- Pemerataan (equality)

- ↳ distribusi penggunaan uang publik dilakukan secara merata bagi masyarakat.

## G. Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan cara mengelola urusan publik secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menciptakan good governance diperlukan administrasi publik yang baik dan kerangka hukum jelas.

# 1. Karakteristik Good Governance Menurut UNDP

## a. Participation

↳ Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan.

## b. Rule of Law

↳ Hukum ditegakkan secara adil dan melindungi hak asasi manusia.

## c. Transparency

↳ Informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat.

## d. Responsiveness

↳ Lembaga pemerintah tanggap terhadap ~~kebutuhan~~ kebutuhan masyarakat.

## e. Consensus Orientation

↳ Pemerintah menjadi penengah untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi masyarakat.

## f. Equity

↳ Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.

## g. Efficiency and Effectiveness

↳ Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan menghasilkan manfaat optimal.

## h. Accountability

↳ Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas setiap kegiatan yang dilakukannya.

### i. Strategic Vision

↳ Pemerintah dan Masyarakat memiliki Pandangan jangka panjang dalam pembangunan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh Akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money (economy, efficiency, dan effectiveness).

## H. Akuntabilitas Publik

### 1. Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang di beri amanah (agent) untuk menanggung jawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas kepada pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

### 2. Jenis Akuntabilitas Publik

#### a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

↳ Pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi dalam struktur organisasi.

Contoh : Pertanggungjawaban Pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat.



b. Akuntabilitas Horizontal

↳ Pertanggungjawaban kepada Masyarakat  
luas sebagai pemegang kepentingan.